

**ANALISIS PENGARUH MEKANISME
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
CORPORATE GOVERNANCE DISCLOSURE**

(Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2012)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**NANDANA ANTYA NIRBHITA
NIM. C2C009092**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nandana Antya Nirbhita
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009092
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH MEKANISME
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
CORPORATE GOVERNANCE DISCLOSURE
(Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 di
Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2012)**
Dosen Pembimbing : Drs. Agustinus Santosa Adiwibowo M.Si., Akt.

Semarang, 17 Oktober 2014

Dosen Pembimbing,

(Drs. Agustinus Santosa Adiwibowo
M.Si., Akt.)

NIP. 19581010 198603 1005

PENGESAHAN KELULUSAN

Nama Penyusun : Nandana Antya Nirbhita
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009092
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH MEKANISME
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
CORPORATE GOVERNANCE DISCLOSURE
(Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 di
Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2012)**
Dosen Pembimbing : Drs. Agustinus Santosa Adiwibowo M.Si., Akt.

Telah dinyatakan lulus pada tanggal 21 November 2014

Tim Penguji :

1. Drs. Agustinus Santosa Adiwibowo M.Si., Akt (.....)
2. Dr. H. Raharja M.Si., Akt (.....)
3. Wahyu Meiranto, SE., M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Nandana Antya Nirbhita, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Analisis Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap *Corporate Governance Disclosure* (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2012), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Semarang, 17 Oktober 2014

Yang membuat pernyataan,

Nandana Antya Nirbhita

NIM. C2C009092

ABSTRACT

This study aims to Analyze the impact of a comprehensive set of corporate governance attributes (board composition, board size, director ownership, blockholder ownership, number of shareholders and number of audit committee) on the corporate governance disclosure in Indonesia. The measurement of corporate governance disclosure is based on published data created from a checklist item by the United Nations.

The samples used were selected by purposive sampling method and taken from list of LQ 45 on Indonesian Stock Exchange. There were 58 companies as samples. Observation period was 2011-2012, so the total number of sample used was 116 samples. Multiple regression was used to analyze the hypothesis.

The result showed that number of shareholders and number of audit committee are positively significant affect corporate governance disclosure and director ownership is negatively significant affect corporate governance. Whereas board composition, board size, blockholder ownership have no effect on the corporate governance disclosure.

Keywords : corporate governance disclosure, board composition, board size, director ownership, blockholder ownership, number of shareholders, number of committee audit

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari komposisi dewan, ukuran dewan, kepemilikan direktur, kepemilikan *blockholder* (saham mayoritas), jumlah pemegang saham dan jumlah komite audit terhadap pengungkapan *corporate governance* di Indonesia. Pengukuran pengungkapan *corporate governance* didasarkan pada ceklis yang diterbitkan oleh PBB.

Sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan diambil dari daftar perusahaan-perusahaan LQ 45 pada Bursa Efek Indonesia. Ada 58 perusahaan sebagai sampel. Periode pengamatan adalah tahun 2011-2012, sehingga total sampel yang digunakan adalah 116 sampel. Regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis.

Hasil menunjukkan bahwa jumlah pemegang saham dan jumlah anggota komite audit signifikan positif berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate governance* dan kepemilikan direktur signifikan negative terhadap pengungkapan *corporate governance*. Sedangkan komposisi dewan, ukuran dewan, kepemilikan *blockholder* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate overnance*

Kata kunci : pengungkapan *corporate governance*, komposisi dewan, ukuran dewan, kepemilikan direktur, kepemilikan *blockholder*, jumlah pemegang saham, jumlah anggota komite audit

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

3C (*Competence , Conscience , Compassion*)

berkompetensi yang unggul, berhati nurani yang benar, berkepedulian sosial

-Jesuit's Spirit-

“ Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ” (Filipi 4: 6)

“Kemampuan seseorang ada batasnya, tetapi usaha seseorang tidak terbatas”

-Eyeshield-

“ A Journey of A Thousand Miles Begins With A Single Step”

-Lao Tzu-

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Tuhan Yesus

Ibu, Bapak, Mbak Dea, Mbak Yayik

Keluarga besar, sahabat dan teman-teman

Kiranya dapat menjadi berkat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Corporate Governance Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2012)**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan, arahan, dan dukungan moril dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Agustinus Drs. Santosa Adiwibowo M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang dengan teliti dan sabar memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikannya.
4. Bapak Herry Laksito , S.E., M.Adv. Acc., Akt. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dari awal sampai akhir studi.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan materi perkuliahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
6. Seluruh staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, perpustakaan dan tata usaha, atas bantuannya dalam kelancaran penulis selama proses studi.

7. Kedua orang tua tercinta (khususnya Ibu) dan kedua saudari penulis (Dea dan Rayi) yang dengan kasih tulus memberikan dukungan, baik moril maupun materiil, nasihat, motivasi dan doa yang tidak terhingga kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Keluarga besar penulis (bude,bulek, pakde, om dan sepupu) yang telah senantiasa memberikan semangat, motivasi dan khususnya doa untuk penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga besar PMK FEB UNDIP, Abang/Mbak/Mas/Adik (Togi, Edo, Arya, Vera, Winda, Fendy, Lae Petrus, Rino, Cesna, Marmel, Renhard, Qhey, Chika, Hayu, Deka, Naomey, Rexy, Milka, Mindo, Kikis , Gina, Mas Ferry, Mas Abbas, Bang Arif, Bang Anthony, Bang Binsar, Bang Remon, Koh Nehe, Koh Ardy, Kak Vellin, Mas Mike, Kak Lidya, Mas Hansen, Kak Grace, Kak Anita, Kak Dina) yang telah mendukung penulis untuk bertumbuh dan berkembang baik dalam iman maupun kuliah.
10. Seluruh teman-teman Akuntansi Reguler I angkatan 2009 (Henry, Becak, Iwak, Mona, Elin, Ina, Liste, Domi, Leo, Dita, Tabung, Galus, Rudi, Panca, Bagus, Yura, Huda, Ivan, Sigit, Fidel,dll) yang telah menjadi teman, sahabat dan keluarga yang baik bagi penulis di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
11. Para sahabat Keluarga Eks Kolese Loyola “Cah Kongkow” (Becak, Henry, Awang, Calvin, Rindy, Dito, Rizky, KD, Hery, Edobodo, Munyuk, Badrun, Tokek, Ian, Fefe, Aldo, Tapir, Adit, Bimo, Buntai, Lek di, Musang, Bo, Willy, Ucup, Ucup Gabahan, Sugi, Thio, dll) yang hampir 8 tahun ini selalu berjuang bersama dalam suka maupun duka dan saling berbagi pengalaman dan kenangan manis.
12. Teman-teman KKN-PPM Tegalrejo Magelang, Desa Kebon Agung (Ode, Rio, Yasto, Azis, Alice, Tya, Kamel, Saras, Lina, Mas Tok) yang telah menjadi tim yang sangat baik bagi penulis selama pelaksanaan KKN penulis.

13. Teman-teman berpetualang (Calvin, Rindy, Awang, Munyuk, Heri, KD, Rizky, Dito, Adit,) yang telah menjadi teman naik gunung, teman dolan, teman “ngglandang” dan khususnya teman hidup bagi penulis.
14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi berkat dan memberikan manfaat bagi orang lain yang membacanya.

Semarang, 20 Oktober 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)	10
2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory)	11
2.1.3 Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance).....	14
2.1.3.1 Pengertian Tata Kelola Perusahaan.....	14
2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Corporate Governance	15
2.1.3.3 Struktur Corporate Governance	17

2.1.3.4	Mekanisme Corporate Governance.....	20
2.1.4	Pengungkapan (Disclosure) dalam Laporan Tahunan	21
2.1.4.1	Pengertian Pengungkapan.....	21
2.1.4.2	Tujuan Pengungkapan.....	22
2.1.4.3	Level Pengungkapan.....	23
2.1.4.4	Jenis Pengungkapan.....	24
2.1.5	Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR).	25
2.1.6	Perusahaan LQ 45	26
2.2	Penelitian Terdahulu	27
2.3	Kerangka Pemikiran.....	34
2.4	Pengembangan Hipotesis	36
2.4.1	Proporsi Dewan Komisaris	36
2.4.2	Ukuran Dewan	37
2.4.3	Kepemilikan Direktur	38
2.4.4	Kepemilikan Blockholder	38
2.4.5	Jumlah Pemegang Saham.....	39
2.4.6	Komite Audit.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	41
3.1.1	Variabel Dependen.....	41
3.1.2	Variabel Independen	45
3.1.2.1	Proporsi Dewan Komisaris	45
3.1.2.2	Ukuran Dewan	46
3.1.2.3	Kepemilikan Direktur	46
3.1.2.4	Kepemilikan Blockholder	46
3.1.2.5	Jumlah Pemegang Saham.....	47
3.1.2.6	Jumlah Komite Audit.....	47
3.5.3	Variabel Kontrol	47
3.1.3.1	Leverage.....	48

3.1.3.2	Ukuran Perusahaan	48
3.1.3.3	Profitabilitas	48
3.1.3.4	Tipe Industri	49
3.2	Populasi dan Sampel	49
3.3	Jenis dan Sumber Data	50
3.4	Metode Pengumpulan Data	50
3.5	Metode Analisis Data	51
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	51
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	51
3.5.2.1	Uji Normalitas	51
3.5.2.2	Uji Multikolinearitas	52
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas	53
3.5.2.4	Uji Autokorelasi	53
3.5.3	Analisis Regresi	54
3.5.4	Pengujian Hipotesis	55
3.5.4.1	Uji F (F Test)	55
3.5.4.2	Uji Regresi Parsial (Uji t)	55
3.5.4.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Objek Penelitian	57
4.2	Deskriptif Variabel Penelitian	57
4.3	Analisis Regresi Berganda	62
4.3.1	Uji Asumsi Klasik	62
4.3.1.1	Uji Normalitas	63
4.3.1.2	Uji Multikolinearitas	64
4.3.1.3	Uji Heterokedastisitas	66
4.3.1.4	Uji Autokorelasi	68
4.3.2	Model Regresi	70
4.3.3	Uji Model (F test)	71
4.3.4	Koefisien Determinasi	72

4.4	Uji Hipotesis.....	73
4.5	Interpretasi Hasil	77
4.5.1	Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris terhadap CGD.....	78
4.5.2	Pengaruh Ukuran Dewan terhadap CGD.....	78
4.5.3	Pengaruh Kepemilikan Direktur terhadap CGD.....	79
4.5.4	Pengaruh Kepemilikan Blockholder terhadap CGD.....	80
4.5.5	Pengaruh Jumlah Pemegang Saham	80
4.5.6	Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap CGD.....	81

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Keterbatasan	84
5.3	Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA	85
----------------------	----

LAMPIRAN A	88
------------------	----

LAMPIRAN B1	90
-------------------	----

LAMPIRAN B2	93
-------------------	----

LAMPIRAN C1	96
-------------------	----

LAMPIRAN C2	98
-------------------	----

LAMPIRAN D.....	100
-----------------	-----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Daftar Item CG Disclosure	42
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	58
Tabel 4.2 Uji Normalitas Multivariate	63
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	65
Tabel 4.4 Uji Heterokedastisitas	67
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	69
Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Regresi	70
Tabel 4.7 Uji Model (F test).....	72
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi.....	72
Tabel 4.9 Uji t	73
Tabel 5.0 Ringkasan Hasil Penelitian	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Single Board System	18
Gambar 2.2 Dual Board System	19
Gambar 2.3 Model Dual Board System di Indonesia	20
Gambar 2.4 Skema Kerangka Pemikiran	35

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel	88
Lampiran B1 Hasil Tabulasi Tahun 2011	90
Lampiran B2 Hasil Tabulasi Tahun 2012	93
Lampiran C1 Hasil Rekapitulasi CGD 2011	96
Lampiran C2 Hasil Rekapitulasi CGD 2012.....	98
Lampiran D Hasil Output SPSS	100

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perusahaan dewasa ini telah sampai pada persaingan global yang memiliki persaingan secara ketat dengan dinamika perubahan yang sangat cepat. Dalam situasi seperti ini *Corporate Governance* (CG) dan pengungkapannya merupakan suatu keharusan dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Implementasi *Corporate Governance* memerlukan komitmen dari seluruh organisasi dan pengelola perusahaan. Weil, et al. (2004) dalam Yasser (2011) mengemukakan bahwa *corporate governance* memiliki makna yang sempit dan luas. Dalam makna sempit, *corporate governance* menyangkut hubungan antara para manajer perusahaan, direksi dan para pemegang saham. Dalam makna lebih luas, *corporate governance* dapat mencakup kombinasi hukum, peraturan, daftar aturan dan praktik sektor swasta secara sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk menarik dana, melakukan efisiensi, menghasilkan laba serta memenuhi kewajiban hukum dan harapan masyarakat umum.

Tata Kelola Perusahaan atau yang sering disebut dengan *Corporate Governance* memiliki banyak manfaat bagi Negara-negara berkembang seperti Indonesia. *Corporate Governance* membantu Negara-negara berkembang mewujudkan pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan dalam perekonomian nasional, memperdalam pasar modal dan meningkatkan

kemampuan untuk memobilisasi tabungan. Selain itu, tata kelola perusahaan meningkatkan investasi, melindungi hak-hak pemegang saham minoritas atau investor kecil. Tata kelola perusahaan juga mendorong pertumbuhan sektor swasta dengan mendukung kemampuan kompetitif, membantu mengamankan pembiayaan proyek-proyek keuangan, menghasilkan keuntungan dan menciptakan lapangan pekerjaan (Dahawy, 2008)

Di Negara-negara maju, tata kelola perusahaan mulai dikaji secara mendalam sejak tahun 1980 . Pada saat itu banyak perusahaan papan atas yang mengalami kebangkrutan (Syakhroza, 2003). Sedangkan di Asia sendiri, termasuk Indonesia, tata kelola perusahaan mulai hangat diperbincangkan pada pertengahan tahun 1997, pada waktu itu sedang terjadi krisis keuangan. Menurut Ho dan Wong (2001), krisis keuangan Asia pada tahun 1997 diakibatkan tidak hanya karena hilangnya kepercayaan investor, tetapi juga karena kurangnya tata kelola perusahaan yang efektif pada pasar keuangan di Asia. Oleh karena itu, investor mulai menjadi lebih memperhatikan pengungkapan informasi perusahaan yang bersifat sukarela karena *mandatory disclosure* belum memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkan investor dari laporan tahunan perusahaan (Hrasky dan Collet, 2005). Pada krisis tersebut Indonesia memiliki nilai *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) paling rendah di tingkat Asia. Nilai CGPI merupakan penilaian mengenai praktik *corporate governance*. Hal ini membuktikan bahwa tata kelola perusahaan dan pengungkapannya sangat penting bagi suatu negara, terlebih negara berkembang seperti Indonesia.

Indonesia sendiri mulai menerapkan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) sejak menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan IMF pada tahun 1998. Sejak saat itu dibentuklah Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang memiliki tugas pokok untuk merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang *Corporate Governance* di Indonesia. KNKCG mulai menerbitkan pedoman GCG pada tahun 2001, pedoman CG bidang perbankan pada tahun 2004 dan pedoman komisaris independen dan pedoman pembentukan komite audit yang efektif.

KNKCG berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat Internasional. *Good Corporate Governance* (GCG) harus memberikan insentif yang tepat bagi manajemen dan dewan guna mencapai tujuan yang menjadi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, serta harus memfasilitasi pengawasan yang efektif. Adanya sistem tata kelola perusahaan yang efektif, dalam sebuah perusahaan individu dan suatu perekonomian secara keseluruhan, membantu menyediakan level kepercayaan yang diperlukan untuk berfungsinya ekonomi pasar. Akibatnya, biaya modal menjadi lebih rendah dan perusahaan didorong untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien, sehingga mendasari pertumbuhan (OECD *Principles of Corporate Governance*, 2004).

Pada tahun 2004, melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON./II.TAHUN 2004, KNKCG berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKKG) yang memperluas cakupan tugas sosialisasi *Governance* bukan hanya di sektor korporasi tetapi juga di sektor pelayanan publik. KNKKG pada tahun 2006 menyempurnakan pedoman CG yang telah diterbitkan pada tahun 2001 agar sesuai dengan perkembangan. Pedoman CG yang diperbaharui KNKKG pada tahun 2006 ini masih menjadi pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan (CG) di Indonesia sampai saat ini.

Berdasarkan berbagai penelitian di luar negeri, praktik tata kelola perusahaan mampu mendorong manajemen untuk meningkatkan pengungkapan sukarela (Meca dan Ballesta, 2010; Akhtaruddin, *et al.*, 2009 ; Baek, *et al.*, 2009; Donnelly dan Mucahy, 2008; Barako, *et al.*, 2006; Lakhali, 2003; Ho dan Wong, 2001; Raffounier, 1995). Tata kelola perusahaan merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan serta meningkatkan kepercayaan investor. *Stakeholder*, termasuk investor di dalamnya, membutuhkan informasi baik keuangan maupun non keuangan yang penting bagi pengambilan keputusan. Jika informasi yang disampaikan tidak seimbang atau timpang dalam informasi maka akan terjadi asimetri informasi. Melalui pengendalian internal yang baik, pelaksanaan dan pengungkapan tata kelola perusahaan mendorong manajemen untuk meminimalkan asimetri informasi (Healy dan Palepu, 2001)

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan praktik *corporate governance* perusahaan telah dilakukan oleh

Mohamad dan Sulong (2010) di Malaysia ; Samaha dan Dahawy (2011) di Mesir. Di Indonesia sendiri penelitian yang sama telah dilakukan oleh Anyta (2011) , Natalia (2012) dan Widadasari (2012). Penelitian Anyta (2011) memfokuskan tingkat pengungkapan CG pada item pengungkapan yang bersifat sukarela. Dalam penelitiannya item pengungkapan CG sukarela dibuat berdasarkan kuesioner terhadap 100 responden sebagai investor. Sedangkan penelitian Natalia (2012) juga meneliti pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CG, dan item pengungkapan CG nya didasarkan pada pedoman umum penerapan GCG yang diterbitkan oleh KNKG yang berisi standar-standar pengungkapan CG. Untuk penelitian widadasari fokus penelitian terhadap pengungkapan CG secara sukarela menggunakan *checklist* dari Aktharuddin et al.

Penelitian ini menggunakan sumber dari Khaled Samaha (2012) dalam jurnal yang berjudul “*The Extent of Corporate Governance Disclosure and its Determinant in Developing Market : the Case of Egypt*” sebagai acuan. Fokus penelitian ini adalah untuk menguji seperangkat mekanisme CG yang terdiri dari karakteristik dewan, struktur kepemilikan dan komite audit terhadap tingkat pengungkapan CG di Indonesia. Karakteristik dewan dalam penelitian ini berupa komposisi dewan dan ukuran dewan dalam perusahaan. Komposisi dewan merupakan proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan, sedangkan ukuran dewan merupakan jumlah anggota dewan dalam perusahaan. Struktur kepemilikan dalam penelitian ini adalah kepemilikan saham oleh anggota direktur dalam sebuah perusahaan, kepemilikan saham mayoritas (*Blockholder ownership*) dan jumlah pemegang saham. Sedangkan untuk komite audit akan dilihat apakah

ada pengaruh antar perusahaan yang memiliki Jumlah anggota komite audit berbeda dengan pengungkapan CG.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tingkat pengungkapan CG dalam penelitian ini menggunakan *checklist item* yang dikembangkan oleh *Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting* (ISAR) yang diorganisasi oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) yang terdiri dari 53 item pengungkapan CG yang terbagi dalam lima kategori. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini diberi judul “**Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Corporate Governance Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 di bursa Efek Indonesia periode 2011-2012)**”

1.2 Rumusan Masalah

Pelaksanaan mekanisme GCG diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan yang dipublikasikan dalam laporan tahunan perusahaan. Krisis yang terjadi pada negara-negara di Asia pada tahun 1997 membuat para investor lebih memperhatikan pengungkapan informasi CG pada perusahaan. Dalam teori agensi mekanisme CG dianggap sebagai faktor kunci untuk menjelaskan keputusan dalam pengungkapan sukarela perusahaan (Samaha,2011). Mekanisme CG tersebut akan dianalisis lebih jauh pada penelitian ini. Disini peneliti tertarik dengan hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dengan

pengungkapan tata kelola perusahaan (*CG disclosure*) perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan menggunakan *checklist* yang dikembangkan oleh ISAR. Oleh karena itu, maka rumusan masalah yang disusun adalah sebagai berikut :

1. Apakah karakteristik dewan perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan tata kelola perusahaan (*CG disclosure*) ?
2. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap luas pengungkapan tata kelola perusahaan (*CG disclosure*) ?
3. Apakah jumlah pemegang saham berpengaruh terhadap luas pengungkapan tata kelola perusahaan (*CG disclosure*)?
4. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan tata kelola perusahaan (*CG disclosure*) ?
5. Apakah variabel kontrol berupa *leverage*, ukuran perusahaan , profitabilitas dan tipe industri berpengaruh terhadap luas pengungkapan tata kelola perusahaan (*CG disclosure*) ?
6. Bagaimana pengungkapan CG perusahaan-perusahaan di Indonesia sesuai dengan *checklist* ISAR ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh seperangkat mekanisme *corporate governance* (CG), yang meliputi karakteristik dewan yang terdiri dari proporsi dewan komisaris perusahaan, ukuran dewan perusahaan ; Struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan direktur, pemegang saham

mayoritas dan jumlah pemegang saham ; dan jumlah anggota komite audit terhadap pengungkapan praktik tata kelola perusahaan (*CG disclosure*) di Indonesia menggunakan *checklist CG disclosure* yang dikembangkan ISAR.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan, investor, kreditor dan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pengungkapan tata kelola perusahaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai studi literatur tentang pengaruh seperangkat mekanisme corporate governance terhadap pengungkapannya

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing akan menguraikan pembahasan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini. Penguraian masing-masing bab akan dibagi sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan merupakan bagian yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Telaah pustaka merupakan bagian yang membahas landasan teori mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian. Bab ini juga menjelaskan sistematika pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian serta hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian.

BAB III Metode penelitian merupakan bab yang berisi deskripsi variabel-variabel penelitian dan operasional penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang berisi deskripsi objek penelitian, analisis data dengan alat dan teknik analisis yang digunakan, serta berisi interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil.

BAB V Penutup merupakan bagian terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan berisi penyajian secara singkat, keterbatasan penelitian dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.

2.1.1 Teori *Stakeholder* (*Stakeholder Theory*)

Menurut Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa perusahaan bukan merupakan entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. *Stakeholder* sendiri didefinisikan oleh Freeman (1984) sebagai “*any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective.*” bahwa *stakeholder* merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi. Kemudian Freeman (1984) mengidentifikasi perubahan yang dapat terjadi pada lingkungan perusahaan dalam dua kategori, yaitu internal dan eksternal. Bagian dari lingkungan internal adalah : pemilik perusahaan, konsumen, karyawan dan pemasok. Sedangkan bagian dari lingkungan eksternal adalah : pemerintah, kompetitor, advokasi konsumen, pemerhati lingkungan, *special interest group* dan media.

Hubungan perusahaan dengan internal *stakeholder* dibangun berdasar konsep kebermanfaatan yang membangun kerjasama untuk bisa menciptakan iklim perusahaan yang mendukung. Sedangkan hubungan dengan *stakeholder* eksternal bukan hanya bersifat transaksional dan jangka pendek namun merupakan hubungan yang fungsional berdasarkan kemitraan untuk menghimpun

kekayaan dan kualitas secara bersama-sama antara perusahaan dengan eksternal stakeholder.

Konsep teori *stakeholder* seperti yang disampaikan diatas tadi menjadi dasar pemikiran mengenai praktik pengungkapan tata kelola perusahaan (*corporate governance disclosure*). *Corporate Governance* seperti didefinisikan Ahmad Daniri (2005) dalam bukunya yang berjudul *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia* menyatakan bahwa “ *Corporate Governance* (CG) didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisaris dan RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku”.

Teori *Stakeholder* adalah konsep dasar yang penting bagi praktik pengungkapan *corporate governance* , karena praktik pengungkapan CG dipandang sebagai salah satu cara manajemen untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan agar kegiatan perusahaan dapat berlangsung secara optimal.

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Definisi hubungan agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Natalia (2012) adalah :

“...a contract relationship which one or more person (the principal) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal.”

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa teori keagenan merupakan suatu hubungan kontrak antara satu atau lebih pihak (*Principal*) terhadap pihak lain (*Agent*) untuk melakukan jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian pengambilan keputusan kepada agen.

Pada intinya, teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Warsono dkk.,(2009) dan Tan (2003) dalam Natalia (2012) menyatakan bahwa pemegang saham (prinsipal) mendelegasikan wewenangnya untuk mengambil keputusan bisnis kepada manajer (*agent*), yang merupakan perwakilan dari pemegang saham.

Menurut Govindarajan (2005) teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agent. Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Agent yang bertugas mengelola perusahaan mempunyai lebih banyak informasi perusahaan

secara keseluruhan, sedangkan prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agent yang membuat terjadinya ketimpangan informasi antara prinsipal dan agent. Ketimpangan informasi ini yang kemudian disebut asimetri informasi.

Terjadinya asimetri informasi ini dapat menimbulkan dua permasalahan (Jensen dan Meckling, 1976) , yaitu :

1. *Moral Hazard* , merupakan permasalahan yang timbul ketika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak dengan prinsipal.
2. *Adverse Selection*, keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian tugas.

Teori Keagenan inilah yang menjadi dasar teoritis yang sangat berpengaruh terhadap konsep *corporate governance* di seluruh dunia. Dengan adanya pengungkapan *corporate governance* dapat menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agent sehingga meminimalkan asimetri informasi yang terjadi. Selain itu, pengungkapan *corporate governance* , diharapkan perusahaan (agen) dapat melaksanakan tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham sebagai prinsipal (Warsono et al., 2009) dalam Natalia (2012).

2.1.3 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*).

2.1.3.1 Pengertian Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*).

Kata *governance* berasal dari bahasa Perancis “*Gubernance*” yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut digunakan dalam konteks perusahaan atau organisasi kemudian disebut *corporate governance*. Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Comittee* pada tahun 1992 yang didefinisikan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. (dikutip dari Arifin, 2005)

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) mendefinisikan *corporate governance* sebagai “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan utama *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Sedangkan menurut Monks dan Minow (1995) mendefinisikan *corporate governance* merujuk pada hubungan antara ketiga kelompok, yaitu *shareholders, boards of director dan top management* dalam menentukan arah dan kinerja korporasi.

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang pada tahun 2004 berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG)

melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON./II.TAHUN 2004 berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerapkan standar *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah diterapkan di tingkat internasional. Tujuan GCG pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Arifin, 2005)

Dilihat dari beberapa pengertian *corporate governance* pada uraian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan aturan “pakem”, sistem dan proses yang mengatur hubungan antara semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan baik internal maupun eksternal, baik dari *top management* hingga karyawan agar terjadi keseimbangan dan iklim kondusif di dalam perusahaan. *Corporate governance* juga mengendalikan dan mengawasi supaya tidak terjadi ketimpangan dalam pemberian informasi perusahaan terhadap pihak yang memiliki kepentingan.

2.1.3.2 Prinsip – Prinsip *Corporate Governance*.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006 menyempurnakan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang sudah dibuat oleh KNKCG sebelumnya pada tahun 2001. Di dalam pedoman itu terdapat lima prinsip *corporate governance*, yaitu sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan

harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan serta memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan untuk tujuan menjaga keberlanjutan jangka panjang dari bisnis dan untuk diakui sebagai warga perusahaan yang baik.

4. Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga tidak ada perusahaan tunggal akan mendominasi yang lain dan tidak ada intervensi dari pihak lain agar pelaksanaan GCG berjalan secara lancar.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) juga mengembangkan lima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu :

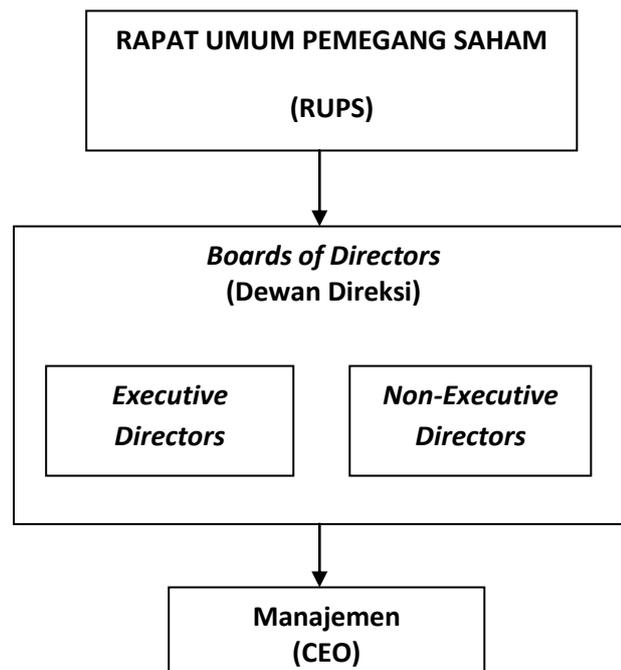
1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham asing dan minoritas.
3. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan.
4. Keterbukaan dan transparansi.
5. Akuntabilitas dewan komisaris.

2.1.3.3 Struktur *Corporate Governance*.

Struktur dapat diartikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan dan dikendalikan (Stoner at al dalam Arifin,2005). Pada umumnya terdapat dua model struktur internal *corporate governance* di dunia, yaitu *The Anglo-American system* dan *The Continental Europe system* . Model *Anglo-American* adalah model yang digunakan di Amerika dan Inggris, yang kemudian lebih dikenal dengan *single board system* , dimana struktur *corporate governance* terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), *Board of Directors* (*executive directors non-executive directors*), serta *executive managers* yang dipimpin CEO. Sistem ini disebut *single board system* karena tidak terdapat pemisahan antara anggota

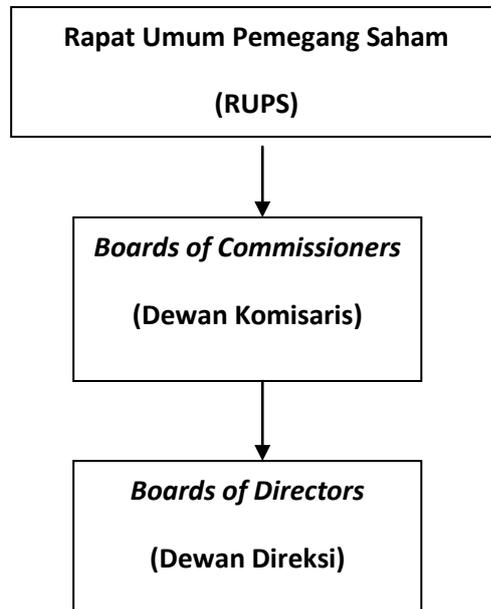
dewan komisaris dengan dewan direksi, sehingga dewan komisaris juga menjabat sebagai dewan direksi.

Gambar 2.1 Single Board System



Sedangkan untuk model *continental* digunakan di Jepang, Kanada, Perancis (Kamal,2010) dan Belanda, struktur *corporate governancenya* terdiri dari RUPS, *Boards of Commissioners* (dewan komisaris) sebagai dewan pengawas, dan *Boards of Directors* (dewan direksi) sebagai eksekutif . Model sistem ini disebut dengan *dual board system* karena terdapat pemisahan fungsi antara dewan pengawas yang diwakili oleh dewan komisaris dengan dewan direksi sebagai eksekutif.

Gambar 2.2 Dual Board System

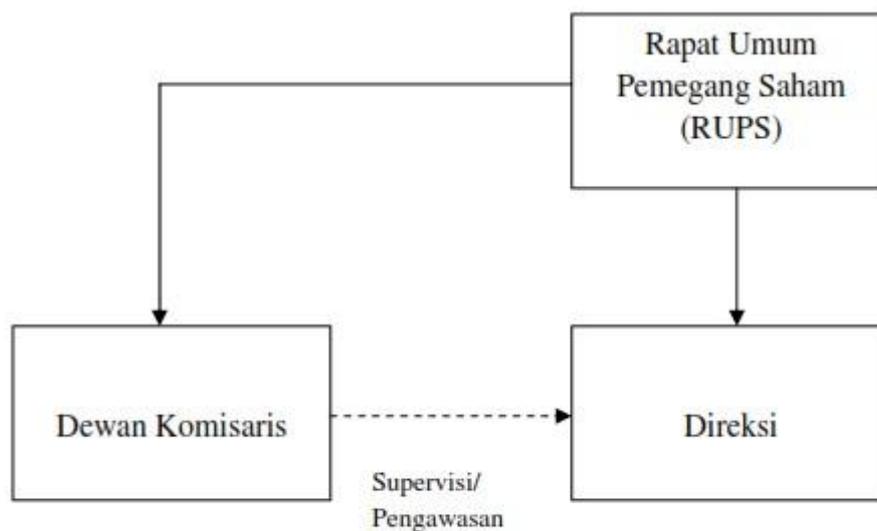


Pada dasarnya struktur *corporate governance* diatur oleh undang-undang sebagai dasar legalitas berdirinya entitas (Arifin,2005). Di Indonesia sendiri sistem hukum sangat kental dipengaruhi dengan hukum Belanda, sehingga baik Indonesia dan Belanda menggunakan sistem *corporate governance* yang sama yaitu *dual board system*.

Di Indonesia sendiri kepengurusan perseroan terbatas menganut *dual board system* . hal tersebut tercantum dalam pedoman *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh KNKG pada tahun 2006 dimana dewan komisaris dan dewan direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun demikian, sistem ini berbeda dengan sistem *continental Europe*, dimana

direksi sejajar dengan dewan komisaris dan pengangkatan maupun pemberhentian merupakan wewenang dari RUPS

Gambar 2.3 Model Dual Board System di Indonesia



Sumber: FCGI, 2001 (dikutip dari Mulia, 2010)

2.1.3.4 Mekanisme *Corporate Governance*.

Menurut Lins dan Warnock (2004) dalam Yesika (2013) Mekanisme *corporate governance* dapat dibagi menjadi dua , yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal merupakan cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan dewan direksi. Sedangkan mekanisme eksternal merupakan cara mempengaruhi perusahaan selain dengan cara internal, seperti pengendalian pasar dan perusahaan.

Walsh dan Seward (1990) dalam Anyta (2011) menyatakan bahwa, “*internal, organizationally based mechanisms of corporate control and external, market-based control mechanisms can be employed to help align the diverse interests of managers and shareholders*”. Artinya, mekanisme pengendalian perusahaan berbasis organisasi (internal) dan mekanisme pengendalian berbasis pasar (eksternal) dapat digunakan untuk membantu menyelaraskan beragam kepentingan manajer dan pemegang saham.

2.1.4 Pengungkapan (*Disclosure*) dalam Laporan Tahunan.

2.1.4.1 Pengertian Pengungkapan

Pengertian umum *disclosure* atau pengungkapan adalah pengungkapan atau pemberian informasi kepada masyarakat secara publik (Dahlan, 2003). Sedangkan menurut (Chariri dan Ghozali, 2007:377) dalam (Anyta, 2011) *disclosure* memiliki arti tidak menutupi dan menyembunyikan. Dalam arti ini perusahaan harus terbuka dalam pemberian informasi mengenai perusahaan baik informasi keuangan maupun keuangan terhadap pihak-pihak yang memerlukan.

Laporan tahunan wajib dilaporkan oleh perusahaan terbatas, emiten atau perusahaan publik. Hal tersebut diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan nomor X.K.6 Keputusan ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-134/BL/2006. Hal ini menjadi penting karena laporan tahunan berisi mengenai pengungkapan informasi yang dapat membantu *stakeholders* dalam mengambil keputusan. Informasi yang diungkapkan tidak

hanya menyangkut informasi keuangan tetapi juga informasi non keuangan termasuk *corporate governance*

Terdapat setidaknya delapan poin wajib yang harus diungkapkan perusahaan di dalam laporan tahunannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam KEP-134/BL/2006. Delapan poin itu adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar data keuangan penting.
2. Laporan dewan komisaris.
3. Laporan direksi.
4. Profil perusahaan.
5. Analisis dan pembahasan manajemen.
6. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*).
7. Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan.
8. Laporan keuangan yang telah diaudit.

2.1.4.2 Tujuan Pengungkapan

Tujuan umum pengungkapan untuk menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk melayani kepentingan berbagai pihak yang berbeda-beda (Widitasari, 2012). Menurut Suwardjono (2010), terdapat tiga tujuan pengungkapan yaitu :

1. Tujuan melindungi (*Protective*), dilndasi bahwa pemakai laporan keuangan memiliki kemampuan untuk menilai dan mendapat informasi , sehingga pemakai tersebut perlu dilindungi.

2. Tujuan informasi (*Informative*) , dilandasi oleh sasaran pemakai sudah diketahui pasti dengan tingkat penilaian tertentu maka penyediaan informasi dapat membantu sebagai pengambilan keputusan pemakai.
3. Tujuan kebutuhan khusus (*differential*), gabungan dari tujuan melindungi dan tujuan informasi. Informasi harus diungkapkan kepada publik dengan batasan informasi yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju.

Sedangkan menurut Belkaoui (2000), tujuan pengungkapan antara lain :

1. Menjelaskan item-item yang diakui dan item-item yang belum diakui serta menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut.
2. Menyediakan informasi dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui bagi investor dan kreditor dalam menentukan risiko dan returnnya.
3. Menyediakan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar pada masa datang.

2.1.4.3 Level Pengungkapan

Menurut Evans(2003) dalam Suwardjono (2010) pengungkapan informasi keuangan didasarkan pada tiga level, yaitu :

1. *Adequate disclosure* (pengungkapan yang memadai), merupakan pengungkapan tingkat minimum yang harus dipenuhi agar pernyataan dalam laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan pengambilan keputusan.

2. *Fair or Ethical disclosure* (pengungkapan yang wajar/etis), tingkat pengungkapan yang harus dicapai agar semua pihak mendapat pelayanan informasi yang sama.
3. *Full disclosure* (pengungkapan penuh), tingkat pengungkapan yang menuntut penyajian seluruh informasi yang relevan dengan proses pengambilan keputusan.

2.1.4.4 Jenis Pengungkapan

Darrough (Natalia, 2012) mengemukakan bahwa terdapat dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu sebagai berikut :

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*).

Merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku (dalam kasus Indonesia sesuai dengan aturan BAPEPAM dan LK) .

2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*).

Merupakan pilihan bebas manajemen untuk memberikan informasi perusahaan diluar dari yang diwajibkan, yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan (Meek *at al*, 1995). Menurut Henderson *et al* (2004) pengungkapan sukarela diklasifikasikan menjadi dua yaitu : *traditional voluntary disclosure* dan *non-traditional voluntary disclosure*. Pengungkapan tradisional pengungkapan informasinya berkaitan dengan kinerja ekonomi perusahaan dan keputusan mengenai aktivitas operasi, pembiayaan

dan investasi. Sedangkan pengungkapan non tradisional pengungkapan informasinya berkaitan dengan lingkungan fisik dan sosial.

2.1.5 *Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR)*

ISAR merupakan kelompok kerja (*working group*) yang diselenggarakan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) . ISAR dibentuk oleh ECOSOC pada tahun 1982. Tujuan dibentuk ISAR ini adalah untuk memfasilitasi investasi, pembangunan dan stabilitas ekonomi dengan mempromosikan praktik-praktik yang baik dalam transparansi perusahaan dan akuntansi. Kelompok kerja ini mengadakan pertemuan tahunan di kantor PBB di Jenewa, Swiss dan melibatkan beberapa ratus delegasi lebih dari setengah negara-negara anggota PBB. ISAR difokuskan pada sejumlah bidang pelaporan perusahaan keuangan dan non keuangan termasuk :

1. Penerapan *International Financial Reporting Standards* (IFRS).
2. Akuntansi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
3. Pengungkapan *Corporate Governance* (CG).
4. Tanggung jawab pelaporan perusahaan.
5. Akuntansi dan pelaporan lingkungan.

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis tentang pengungkapan *corporate governance* dengan menggunakan *checklist* yang telah dikembangkan

ISAR. *Checklist* tersebut berisi 53 items yang terbagi menjadi lima kategori pengungkapan *corporate governance*, yaitu:

1. Struktur kepemilikan dan pelaksanaan hak kontrol (Sembilan item)
2. Transparansi dan informasi keuangan (Sembilan item)
3. Proses audit (Sembilan item)
4. Tanggung jawab perusahaan (tujuh item)
5. Struktur dewan dan manajemen (19 item)

2.1.6 Perusahaan LQ 45

Indeks LQ 45 adalah nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham yang paling likuid dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar . Indeks LQ 45 menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan tiap enam bulan (awal bulan Februari dan Agustus). Beberapa kriteria seleksi untuk menentukan suatu emiten dapat masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 adalah sebagai berikut :

1. Telah tercatat di BEI minimal tiga bulan.
2. Aktivitas transaksi di pasar regular, yaitu nilai, volume dan frekuensi transaksi.
3. Jumlah hari perdagangan di pasar regular.
4. Kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu.
5. Selain mempertimbangkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar, akan dilihat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan tersebut.

Saham-saham yang termasuk dalam indeks LQ 45 akan terus dipantau dan setiap enam bulan akan di review. Apabila ada saham yang sudah tidak masuk kriteria, maka akan diganti dengan saham lain yang memenuhi syarat. Pemilihan saham-saham LQ 45 harus wajar, oleh karena itu BEI mempunyai komite penasihat yang terdiri dari ahli-ahli di BAPEPAM, universitas dan profesional di bidang pasar modal (*Factbook 1997, Jakarta Stock Exchange*)

2.2 Penelitian Terdahulu

Khazami Abbas (2010) meneliti tentang hubungan mekanisme *corporate governance* dengan luas pengungkapan sukarela terhadap perusahaan-perusahaan di Iran. Penelitian ini menggunakan 31 item *checklist* yang di dapatkan pada penelitian yang sama. Khazami Abbas (2010) menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara proporsi independen dewan non eksekutif dualitas CEO dengan luas pengungkapan *corporate governance*. Sedangkan proporsi kepemilikan investor merupakan satu-satunya mekanisme *corporate governance* yang mempengaruhi pengungkapannya.

Penelitian menguji dampak mekanisme CG terhadap luas pengungkapan juga dilakukan di Malaysia oleh Mohamad dan Sulong (2010). Penelitian berfokus pada empat sektor industri terbesar di Malaysia, yaitu *consumer, industrial, construction dan trading*. Sampel menggunakan 80 perusahaan periode tahun 2002 dan 2006. Hasil penelitian menunjukkan proporsi dewan non eksekutif berpengaruh negative tidak signifikan terhadap pengungkapan. Sementara proporsi komite audit independen dan dualitas CEO berpengaruh

positif tidak signifikan terhadap pengungkapan CG. Satu-satunya mekanisme CG yang signifikan terhadap pengungkapan CG pada penelitian ini adalah proporsi anggota keluarga dalam dewan.

Sementara penelitian Anyta (2011) menjelaskan pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap VCGD (*Voluntary Corporate Governance Disclosure*) perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tidak termasuk perusahaan yang delisted. Dalam penelitian ini, sektor *finance* dikeluarkan dari sampel karena memiliki pedoman yang berbeda dengan pedoman *corporate governance* pada perusahaan selain *finance*. Item pengungkapan *corporate governance* menggunakan 105 item yang didapatkan dari pedoman umum GCG (KNKG). Kemudian 105 item tersebut ditentukan pengungkapan wajib dan sukarela sehingga menghasilkan 34 item pengungkapan sukarela. Lalu 34 item itu dikirim ke 100 responden untuk diberikan nilai dengan *range* satu sampai tujuh. Nilai item dengan minimal empat poin dipertahankan dan lainnya akan di eliminasi. Penelitian ini menggunakan variabel independen : konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, presentase saham, proporsi komisaris independen dan independensi komite audit. Penelitian ini menggunakan teknik analisis berganda.

Widitasari (2012) meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap luas pengungkapan sukarela. Luas pengungkapan sukarela diukur dengan checklist CG disclosure dari Aktahrudin et al yang telah disesuaikan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa proporsi komisaris independen dan kepemilikan

institusional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela, sedangkan komite audit berpengaruh signifikan.

Safitri (2008) meneliti pengaruh profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan CG menggunakan variable kontrol ukuran perusahaan, *listing status*, auditor status, jenis industri dan *dispersed ownership level*. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi level pengungkapan CG. Sedangkan untuk variabel kontrol ukuran perusahaan dan *listing status* berpengaruh positif.

Kamal Hasan (2013) meneliti pengaruh dualitas CEO, kekuatan CEO, ukuran dewan, dewan komite, auditor eksternal dan kepemilikan asing terhadap luas pengungkapan sukarela. Dalam penelitiannya menyimpulkan audit eksternal dan dewan komite berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela CG, sedangkan dualitas CEO, kekuatan CEO, ukuran dewan dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela CG.

Haj Omar (2013) meneliti pengaruh proporsi direktur non eksekutif, proporsi anggota keluarga dalam dewan, ukuran dewan, dualitas CEO, komite audit independen, kepemilikan pemerintah terhadap luas pengungkapan sukarela CG. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa proporsi direktur non eksekutif, ukuran dewan, dan komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CG sukarela. Sedangkan proporsi anggota keluarga dalam dewan, dualitas CEO dan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CG sukarela.

Yuen, *et al.* (2009) menguji dampak fitur kepemilikan, mekanisme tata kelola perusahaan dan karakteristik spesifik perusahaan terhadap pengungkapan sukarela yang disediakan oleh perusahaan publik yang tercatat di *Shanghai Stock Exchange*, China. Fitur struktur kepemilikan dan mekanisme tata kelola perusahaan meliputi konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh Negara, kepemilikan individu, dualitas CEO, dewan independen, keberadaan komite audit. Karakteristik spesifik perusahaan meliputi ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan jenis industri. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan individu, keberadaan komite audit, kepentingan *stakeholder*, secara signifikan berkaitan dengan pengungkapan CG sukarela. Penelitian-penelitian diatas dapat dilihat secara ringkas pada tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dibawah ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	VARIABEL	TEKNIK	HASIL
1	Kusumawati (2007)	Independen : Profitabilitas Variabel Kontrol : <i>Firm size, listing status, auditor status, industry type dan dispersed ownership</i> Dependen : <i>Voluntary GCG disclosure level</i>	<i>Descriptive statistic dan multiple regression</i>	a. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan GCG b. Ukuran perusahaan dan status auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan GCG c. Listing status dan kepemilikan disperse berpengaruh sangat kecil terhadap pengungkapan GCG d. Tipe industri tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan GCG

2	Safitri (2008)	<p>Independen: Profitabilitas</p> <p>Variabel</p> <p>Kontrol: Ukuran perusahaan, listing status, auditor status, jenis industri, <i>dispersed ownership level</i></p> <p>Dependen: Tingkat pengungkapan CG</p>	Regresi Linier berganda	<p>a. Profitabilitas negatif terhadap tingkat pengungkapan CG.</p> <p>b. Ukuran perusahaan dan listing status positif terhadap tingkat pengungkapan CG.</p> <p>c. Auditor status, jenis industri dan <i>dispersed ownership level</i> positif terhadap pengungkapan CG</p>
3	Yuen, et al (2009)	<p>Independen: <i>Ownership concentration government ownership & legal entity, percentage of tradable shares, CEO is top dir, independent of board, audit committee.</i></p> <p>Variabel</p> <p>Kontrol: <i>Firm size, leverage, profitability dan industry type</i></p> <p>Dependen: <i>The extent of voluntary CG disclosure</i></p>	<i>Descriptive statistic, correlation analysis dan multiple regression</i>	<p>d. Konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela CG</p> <p>e. Kepemilikan pemerintah/institusional dan kepemilikan individu berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela CG</p> <p>f. Dualitas CEO berhubungan tidak signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela CG</p> <p>g. Komite audit tidak berpengaruh secara signifikan dengan luas pengungkapan sukarela CG</p>
4	Mohamad dan Sulong (2010)	<p>Independen: Direktur non eksekutif independen, komite audit, dualitas CEO, anggota keluarga dalam</p>	<i>Descriptive statistic, correlation analysis, univariate analysis dan regresi</i>	<p>a. Proporsi direksi non eksekutif independen negatif tidak signifikan terhadap level pengungkapan CG</p> <p>b. Komite audit dan dualitas jabatan positif tidak</p>

		<p>dewan</p> <p>Variabel Kontrol: <i>Size, leverage, profitabilitas dan tahun keuangan</i></p> <p>Dependen: Luas pengungkapan CG</p>		<p>signifikan terhadap level pengungkapan CG</p> <p>c. Satu satunyan mekanisme CG yang signifikan terhadap level pengungkapan CG di Malaysia yaitu proporsi anggota keluarga dalam dewan</p>
5	Samaha (2010)	<p>Independen: <i>Board composition, board size, duality in position, ownership structure, director ownership, blockholder ownership dan audit committee</i></p> <p>Variabel Kontrol: <i>Leverage, firm size, profitability dan industry type</i></p> <p>Dependen: <i>Corporate governance disclosure (CGD)</i></p>	<i>Descriptive analysis, correlation analysis, regression</i>	<p>a. <i>Board composition</i> berhubungan positif signifikan terhadap CGD</p> <p>b. <i>Board size</i> tidak berpengaruh terhadap CGD</p> <p>c. <i>Duality in position</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap CGD</p> <p>d. <i>Ownership structure</i> berpengaruh negatif terhadap CGD</p> <p>e. <i>Blockholder ownership</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap CGD</p> <p>f. <i>Audit committee</i> berpengaruh positif signifikan terhadap CGD</p>
6	Widitasari (2012)	<p>Independen: Proporsi komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional</p> <p>Dependen: Luas pengungkapan CG sukarela</p>	Regresi linier berganda	<p>d. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CG sukarela</p> <p>e. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CG sukarela</p> <p>f. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh</p>

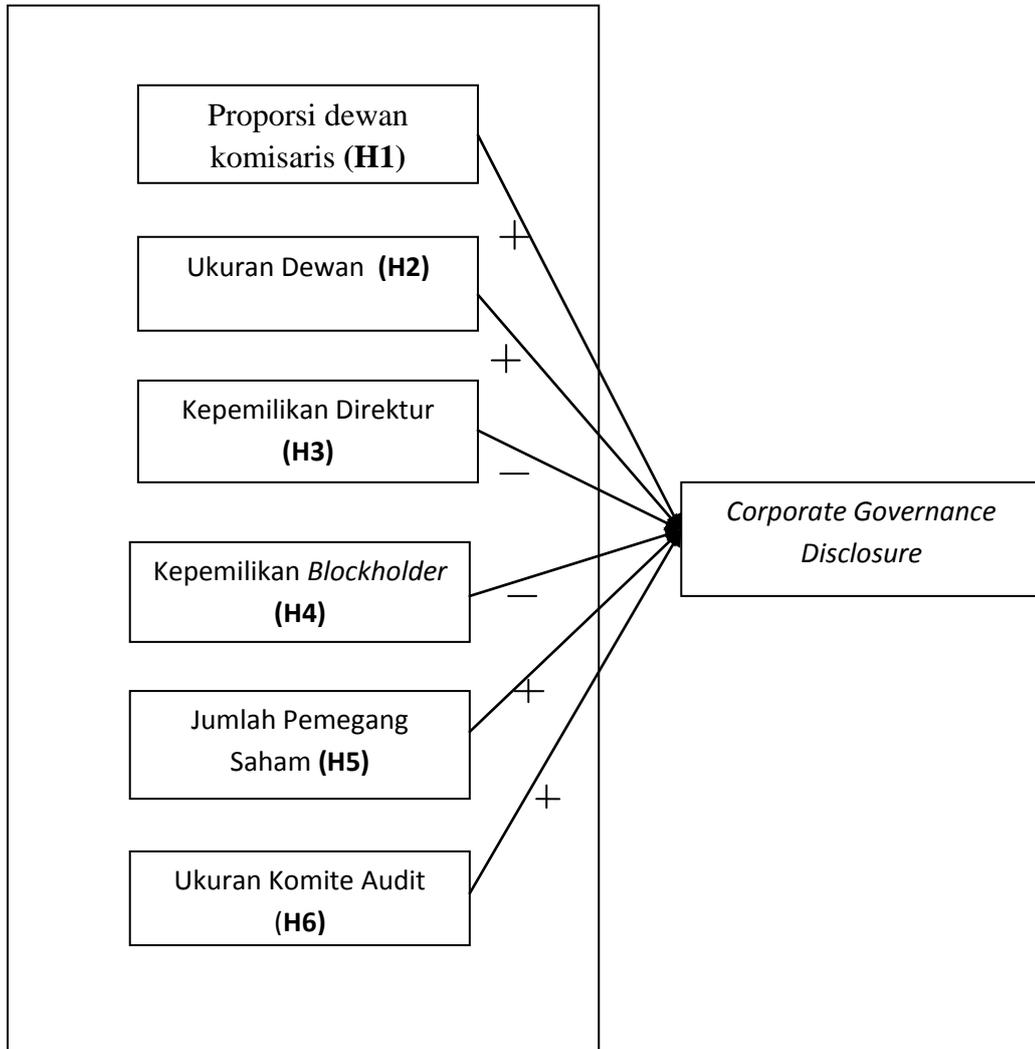
				terhadap luas pengungkapan CG sukarela
7	Kamal Hasan (2013)	Independen : Dualitas CEO, kekuatan CEO, ukuran dewan, dewan komite, auditor eksternal dan kepemilikan asing Dependen: Luas pengungkapan sukarela	Regresi linier berganda	a. Audit eksternal dan dewan komite berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela b. Dualitas CEO, kekuatan CEO, ukuran dewan dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.
8	Haj Omar (2013)	Independen: Proporsi direktur non eksekutif, proporsi anggota keluarga dalam dewan, ukuran dewan, dualitas CEO, komite audit independen, kepemilikan pemerintah Dependen: Luas pengungkapan CG sukarela	Regresi linier berganda	a. Proporsi direktur non eksekutif, ukuran dewan dan komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CG sukarela b. Proporsi anggota keluarga di dewan, dualitas CEO dan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CG sukarela

Sumber : review dari berbagai sumber

2.3 Kerangka Pemikiran

Dari beberapa penelitian terdahulu, terlihat *CG disclosure* antar perusahaan maupun antar negara ternyata sangat beragam baik yang merupakan kewajiban atau sukarela. Penelitian ini mengembangkan beberapa faktor yang kemungkinan besar berpengaruh terhadap pengungkapan CG. Beberapa faktor tersebut adalah karakteristik dewan yang terdiri dari proporsi dewan komisaris dan ukuran dewan ; Struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan direktur, kepemilikan *blockholder* dan jumlah pemegang saham dan komite audit. Pada penelitian ini juga digunakan variabel kontrol yang berupa *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan tipe industri. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.4 Skema Kerangka Pemikiran dibawah ini.

Gambar 2.4 Skema Kerangka Pemikiran



- Variabel Kontrol**
1. *Leverage*
 2. Ukuran perusahaan
 3. Profitabilitas
 4. Tipe industri

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Proporsi Dewan Komisaris

Merupakan proporsi direktur non eksekutif (dewan komisaris) independen pada perusahaan. Fama (1980) berpendapat bahwa dewan komisaris yang dipilih oleh pemegang saham merupakan kontrol utama internal dalam mengawasi manajer. Lebih jauh lagi Fama mengatakan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen dapat menambah kualitas pengawasan terhadap manajemen, karena dewan komisaris independen lebih merepresentasikan sebagai kepentingan pemegang saham.

Dewan komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (Anyta,2011). Tetapi dewan komisaris tidak berhak untuk mengambil keputusan operasional. Penelitian oleh Ezat dan El-Masry (2008) ; Samaha dan Dahawy (2010 dan 2011) menemukan bahwa ada hubungan positif antara komisaris independen dengan pengungkapan sukarela di Mesir. Disisi lain para peneliti menemukan hubungan yang tidak signifikan antara dewan komisaris independen dengan pengungkapan sukarela (Ghazali dan Weetman (2006) , Hanifa dan Cooke (2002), Ho dan Wong (2011))

Yuen, et al (2009) dalam Anyta (2011) menemukan bahwa perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi memiliki level pengungkapan sukarela yang lebih tinggi pula. Keberadaan mekanisme pengendalian eksternal serta lingkungan, meningkatkan kekuatan hubungan antara

proporsi komisaris independen dan level pengungkapan. Sementara itu penelitian Wijayanti (2009) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif, namun tidak signifikan antara proporsi komisaris independen terhadap luas pengungkapan. Berdasarkan uraian-uraian diatas, penelitian ini akan menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan CG perusahaan-perusahaan di Indonesia sesuai sampel dan populasi yang ditentukan.

H1 : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate governance*.

2.4.2 Ukuran Dewan

Ukuran dewan merupakan jumlah dewan direksi dan dewan komisaris dalam perusahaan. Berdasarkan teori agensi ukuran dewan yang besar memiliki peran penting dalam mengawasi dewan dalam membuat keputusan strategik. Penelitian sebelumnya menemukan hubungan negatif antara ukuran dewan dengan manajemen laba. Berdasarkan hal itu ukuran dewan yang besar dapat meningkatkan kualitas pengungkapan. Tetapi penelitian Goodstein, Gautam dan Boeker (1994) mengemukakan ukuran dewan yang besar memiliki efek negatif dalam *effectiveness*. Anggota dewan yang besar memiliki motivasi yang kurang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategik perusahaan.

Namun penelitian Barako et al, 2006 ; Hussainey,2008 dan Laksmana, 2008 dalam Samaha,2010 menemukan hubungan positif antara ukuran dewan dengan pengungkapan sukarela. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan menganalisis hubungan antara ukuran dewan dengan pengungkapan CG.

H2 : Ukuran dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate governance*.

2.4.3 Kepemilikan Direktur

Kepemilikan direktur disini merupakan kepemilikan saham direktur terhadap perusahaan. Kepemilikan saham direktur yang rendah dapat menambah masalah agensi karena manajer membutuhkan insentif yang lebih besar untuk bonus, dan insentif yang rendah untuk memaksimalkan kinerja (Eng dan Mak, 2003). Berdasar penelitian Ruland, Tung dan George (1990) di Singapura menunjukkan kepemilikan direktur memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengungkapan sukarela. Begitu juga dengan penelitian Ghazali dan Weetman (2006) di Malaysia menemukan hal serupa. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan menganalisis hubungan antara kepemilikan direktur dengan pengungkapan CG.

H3 : Kepemilikan direktur berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate governance*.

2.4.4 Kepemilikan *Blockholder*

Blockholder adalah pemegang saham mayoritas perusahaan. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan negatif antara kepemilikan blockholder dengan pengungkapan di negara-negara maju seperti Australia (McKinnon & Dalimunthe , 1993; dan Mitchell , Chia , & Loh , 1995) , Finlandia (Schadewitz & Blevins , 1998) , dan Jerman (Marston & Poley , 2004). Hasil yang beragam ditemukan di negara-negara berkembang. Dalam konteks Malaysia, misalnya,

Hossain, Tan dan Adams (1994) menemukan hubungan negatif antara pengungkapan sukarela dan kepemilikan *blockholder*. Sementara Haniffa dan Cooke (2002) menemukan hubungan positif antara kepemilikan *blockholder* dengan pengungkapan.

Marston dan Polei (2004) berpendapat bahwa investor yang memiliki hanya sebagian kecil dari saham perusahaan memiliki akses terbatas informasi tentang perusahaan. Oleh karena itu ada kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan mayoritas yang lebih banyak akan mengungkapkan informasi lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan investor. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan menganalisis hubungan antara kepemilikan *blockholder* dengan pengungkapan CG.

H4 : Kepemilikan *blockholder* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate governance*.

2.4.5 Jumlah Pemegang Saham

Berdasarkan teori agensi, Garcia-Meca dan Sanchez-Ballestables (2010) berpendapat asimetri informasi antara perusahaan dan stakeholder menjadi lebih besar ketika kepemilikan tersebar luas. Oleh karena itu jumlah pemegang saham perusahaan yang besar akan menambah biaya agensi. Untuk mengurangi biaya tersebut, perusahaan berusaha mengungkapkan informasi mereka pada laporan tahunan dan *website*. Penelitian terdahulu menemukan hubungan positif antara jumlah pemegang saham dengan pengungkapan misalnya di Swedia (Cooke,1989) ; Amerika Serikat (Malone, Fries dan Jones, 1993) ; Hongkong dan Singapura (Chau dan Gray, 2002). Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan

menganalisis hubungan antara jumlah pemegang saham dengan pengungkapan CG.

H5 : Jumlah pemegang saham berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate governance*.

2.4.6 Komite Audit

Secara historis, komite audit adalah mekanisme pengawasan yang dibentuk secara sukarela dalam situasi biaya agensi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas arus informasi antara prinsipal dan agen (Bradbury, 1990). Komite Audit dapat menjadi bagian penting dari sistem kontrol keputusan yang digunakan oleh dewan direksi untuk memantau pengendalian internal (Fama, 1980), termasuk memastikan kualitas akuntansi dan sistem kontrol keuangan (Collier, 1993).

Bukti empiris menunjukkan bahwa komite audit memainkan peran komplementer terhadap pengungkapan informasi (Barako et al, 2006;. Forker, 1992). Samaha dan Dahawy (2010 dan 2011) menemukan keberadaan efek komplementer komite audit terhadap pengungkapan sukarela perusahaan umum, namun Samaha (2010) tidak menemukan hubungan yang signifikan dengan pengungkapan tata kelola perusahaan Mesir. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menganalisis hubungan antara komite audit dengan pengungkapan CG.

H6 : Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate governance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini berfokus pada pengujian seperangkat mekanisme *corporate governance* yang meliputi karakteristik dewan, struktur kepemilikan dan komite audit terhadap tingkat pengungkapan *corporate governance* di Indonesia. Di dalam penelitian ini terdapat enam hipotesis yang telah dikembangkan dengan menggunakan empat variabel kontrol.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan di dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan tata kelola perusahaan (*corporate governance disclosure*). Tingkat pengungkapan CG pada penelitian ini diukur menggunakan teknik analisis isi yang dapat ditemukan didalam laporan tahunan dan *website* perusahaan. Sebagai langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa *website* resmi perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai laporan tahunan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan *checklist* pengungkapan CG *Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR)* yang diorganisasi oleh *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*. *Checklist* pengungkapan CG tersebut terdiri dari 53 item yang terdiri dari lima kategori, yaitu :

1. Pengungkapan struktur kepemilikan dan pelaksanaan hak control.
2. Pengungkapan transparansi dan informasi keuangan.

3. Pengungkapan proses audit.
4. Pengungkapan tanggung jawab perusahaan.
5. Pengungkapan struktur dewan dan manajemen.

Lima kategori yang berisi 53 item tersebut yang akan digunakan sebagai *checklist* untuk pengungkapan CG. Berikut adalah 53 item tersebut tersaji dalam tabel.

Tabel 3.1
Tabel Daftar Item CG Disclosure

DAFTAR ITEM CG DISCLOSURE
<p><u>STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN PELAKSANAAN HAK KONTROL</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur kepemilikan 2. Hak control 3. Ketersediaan dan aksesibilitas agenda pertemuan 4. Perubahan pemegang saham 5. Proses mengadakan pertemuan umum tahunan 6. Control dan kecocokan ekuitas saham 7. Struktur control 8. Aturan dan prosedur mengatur akuisisi kendali perusahaan di pasar modal 9. Langkah pengambilalihan perusahaan
<p><u>TRANSPARANSI DAN INFORMASI KEUANGAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil keuangan dan operasi 2. Tujuan/sasaran perusahaan 3. Estimasi akuntansi kritis 4. Sifat, jenis dan unsure transaksi dengan pihak relasi 5. Praktik pengungkapan transaksi pihak terkait 6. Tanggung jawab dewan mengenai komunikasi keuangan 7. Proses pengambilan keputusan menerima transaksi dengan pihak relasi

8. Dampak dari alternatif keputusan akuntansi
9. Aturan dan prosedur mengatur transaksi luar biasa

PROSES AUDIT

1. Kepercayaan dewan terhadap independensi dan integritas auditor eksternal
2. Proses interaksi dengan auditor eksternal
3. Proses penunjukan auditor internal / lingkup pekerjaan dan tanggung jawab
4. Control sistem internal
5. Durasi auditor
6. Rotasi mitra audit
7. Proses interaksi dengan auditor internal
8. Proses penunjukan auditor eksternal
9. Keterlibatan auditor dalam pekerjaan non audit dan biaya untuk auditor

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

1. Kebijakan dan kinerja perusahaan dalam hal tanggung jawab lingkungan dan social
2. Dampak kebijakan tanggung jawab lingkungan dan social terhadap keberlanjutan perusahaan
3. Mekanisme perlindungan hak *stakeholder* dalam bisnis
4. Kode etik dewan
5. Kode etik untuk semua karyawan perusahaan
6. Peran karyawan dalam *corporate governance*
7. Kebijakan perlindungan terhadap *whistle blower* untuk semua karyawan

STRUKTUR DEWAN DAN MANAJEMEN

1. Tujuan manajemen risiko, sistem dan kegiatan
2. Komposisi dewan direksi
3. Independensi dalam dewan direksi
4. Jumlah luar dewan direktur dan posisi manajemen yang dipegang direksi
5. Jenis dan tugas dewan dan posisi manajemen

6. Keberadaan *plan of succession*
7. Kualifikasi dan informasi biografis anggota dewan
8. Penentuan dan komposisi remunerasi direksi
9. Mekanisme *check and balance*
10. Komite dan mekanisme pencegahan konflik kepentingan
11. Komposisi dan fungsi komite struktur pengendalian
12. Peran dan fungsi dewan direksi
13. Aktivitas pelatihan dan pengembangan secara professional
14. Durasi kontrak direktur
15. Kebijakan kompensasi bagi eksekutif senior bila terjadi akuisisi/*merger*
16. Adanya prosedur menangani konflik kepentingan antar anggota dewan
17. Proses evaluasi kinerja
18. Kepentingan material dari anggota dewan dan manajemen
19. Ketersediaan dan penggunaan fasilitas *advisorship* selama periode pelaporan

Sumber : jurnal acuan Khaled Samaha (2012)

Kemudian *checklist* ISAR yang terdiri dari 53 item tersebut diproses menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Berelson dan Kerlinger, 1954). Dalam penelitian ini analisis diaplikasikan dengan indeks tidak tertimbang menggunakan nilai dikotomis, yaitu nilai 1 untuk setiap item *checklist* yang diungkapkan di laporan tahunan perusahaan dan nilai 0 untuk tiap item yang tidak diungkapkan (Rini, 2010), sehingga didapatkan indeks skor pengungkapan dalam bentuk angka prosentase.

Indeks CG *Disclosure* (ICGD) pada laporan tahunan perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Yuen *et al*, 2009)

$$\boxed{\text{ICGD}} = \frac{\text{Total skor yang diungkapkan oleh perusahaan}}{\text{Skor maksimum yang mungkin diperoleh perusahaan}}$$

ICGD : Indeks *Corporate Governance Disclosure*

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Proporsi Dewan Komisaris

Merupakan proporsi dewan komisaris independen pada perusahaan. Dewan komisaris independen adalah sekelompok orang terdiri atas direktur non-eksekutif yang bertanggung jawab terhadap perusahaan. Menurut (Fama,1980) dewan komisaris yang dipilih oleh pemegang saham merupakan kontrol internal utama dalam mengawasi manajemen. Lebih jauh lagi Fama mengatakan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen dapat menambah kualitas pengawasan terhadap manajemen, karena dewan komisaris independen tidak berhubungan dengan perusahaan sebagai pegawai perusahaan, tetapi lebih merepresentasikan sebagai kepentingan pemegang saham.

Proporsi dewan komisaris independen pada laporan tahunan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\boxed{\text{PDKIn}} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

PDKin : Proporsi Dewan Komisaris independen

3.1.2.2 Ukuran Dewan

Ukuran dewan merupakan jumlah dewan direksi dan dewan komisaris dalam perusahaan. Di dalam teori agensi semakin besar ukuran dewan semakin besar juga pengawasan di dalamnya yang berguna dalam pengambilan keputusan strategik perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran dewan dihitung dengan menjumlahkan dewan direksi dan dewan komisaris.

$$\boxed{\text{UD}} = \text{Jumlah Dewan Direksi} + \text{Jumlah Dewan Komisaris}$$

UD : Ukuran Dewan

3.1.2.3 Kepemilikan Direktur

Seorang direktur yang memiliki sebagian besar saham perusahaan menanggung konsekuensi dan menuai manfaat dari tindakan manajerial yang dapat merusak dan menciptakan nilai, dengan demikian, biaya agensi dapat dikurangi (Jensen & Meckling, 1976). Dalam penelitian ini kepemilikan direktur dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\boxed{\text{KDir}} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh direktur}}{\text{Jumlah saham perusahaan}}$$

3.1.2.4 Kepemilikan *Blockholder*

Dalam penelitian ini Kepemilikan saham mayoritas merupakan jumlah pemilik saham (dalam prosentase) yang memiliki prosentase saham lebih dari lima persen (5%) dari jumlah saham perusahaan.

3.1.2.5 Jumlah Pemegang Saham

Berdasarkan teori keagenan , Garcia-Meca and Sanchez-Ballestables (2010) berpendapat asimetri informasi antara perusahaan dengan pemegang saham semakin besar ketika jumlah pemegang saham perusahaan semakin banyak. Di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai apakah jumlah pemegang saham berpengaruh terhadap pengungkapan CG.

3.1.2.6 Jumlah Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang ditentukan oleh anggota dewan komisaris untuk mengawasi proses penyusunan pelaporan keuangan perusahaan. Berdasarkan surat edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 menyatakan bahwa komite audit pada perusahaan publik di Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan dipimpin oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang pihak eksternal yang bersifat independen. Dalam penelitian ini komite audit dihitung dengan menjumlahkan anggota komite audit dalam tiap perusahaan.

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Dalam penelitian ini terdapat

empat variabel kontrol, yaitu : *Leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan tipe industri.

3.1.3.1 *Leverage*

Leverage merupakan kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan hutang dalam membiayai investasi (Endrian, 2010). *Leverage* yang tinggi berarti perusahaan menggunakan utang yang tinggi. Penggunaan utang yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas, disisi lain juga meningkatkan risiko. Tingkat *leverage* pada penelitian ini diukur dengan *Debt to ratio*, yaitu membandingkan utang jangka panjang dengan total aset perusahaan.

$$\boxed{\text{Debt to Ratio}} = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Aktiva / Aset}}$$

3.1.3.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini merupakan *natural logarithm* dari total aset perusahaan pada akhir tahun.

$$\boxed{\text{UKP}} = \text{Ln Total Aset}$$

3.1.3.3 Profitabilitas

Profitabilitas menurut G. Sugiyarso dan F. Winarni (2005) adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas dalam penelitian ini dengan *basic*

earning power yaitu membandingkan laba sebelum bunga dengan pajak dengan total aktiva.

$$\boxed{\text{BEP}} = \frac{\text{Laba sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

3.1.3.4 Tipe Industri

Merupakan pengelompokan jenis industri. Dalam penelitian ini pengukuran tipe industri menggunakan variabel *dummy*, dimana perusahaan manufaktur; infrastruktur, utilitas dan transportasi; keuangan; perdagangan dan jasa akan diberi nilai 1 sedangkan untuk perusahaan selain itu akan diberi nilai 0.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 januari– 2012 akhir. Jumlah populasi tersebut adalah 58 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan populasi tersebut akan ditentukan sampel sebagai objek penelitian dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan tersebut mempublikasikan *annual report* tahun 2011/2012 yang dapat diakses melalui *website* perusahaan dan website Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>). Ini menunjukkan bahwa informasi yang terdapat dalam *annual report* perusahaan dapat diakses oleh publik dengan mudah.

2. Kelengkapan data perusahaan. Hal ini berarti semua variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini disajikan dalam laporan tahunan perusahaan.
3. Distribusi *unstandardized data* normal . Hal ini berarti data yang menyebabkan tidak terpenuhinya kriteria tersebut harus dikeluarkan dari sampel, karena syarat berlakunya model adalah terpenuhinya kriteria tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45. Sumber data yang akan digunakan merupakan data publikasi yang berupa laporan LQ-45 periode Januari 2011 – akhir 2012, laporan tahunan dan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Sumber data tersebut diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Diponegoro , *website* resmi masing-masing perusahaan dan website resmi Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari data-data dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Data-data dan dokumen-dokumen tersebut adalah laporan LQ-45 yang diterbitkan oleh BEI pada periode Januari 2011- akhir

2012 , laporan tahunan dan laporan keuangan yang didapatkan dari *website* resmi perusahaan / *website* resmi BEI atau pojok BEI Universitas Diponegoro.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menentukan pengungkapan *corporate governance* berdasar 53 item checklist dari ISAR. Teknik analisis isi dilakukan dengan membaca laporan tahunan perusahaan sampel dan mencocokkan setiap item pengungkapan *corporate governance*.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel yang akan diuji. Alat analisis yang digunakan adalah *mean* (nilai rata-rata), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi untuk mendeskripsikan variabel penelitian.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda, dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data normal atau mendekati normal. Metode uji normalitas pada penelitian ini antara lain :

1. Analisis Grafik

Merupakan analisis grafik histogram dan analisis grafik normal plot. Dasar pengambilan keputusannya adalah (Ghozali, 2006) :

- a. Jika titik menyebar disekitar garis diagonal dan atau mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Analisis Statistik

Menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S). Dasar pengambilan keputusan pada analisis Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S) adalah (Ghozali,2006) :

- a. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 , maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- b. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan dalam model regresi untuk menunjukkan korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. jika terjadi korelasi antar variabel independennya, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Untuk

mendeteksi multikolinearitas antar variabel independen dapat dilihat dari *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). nilai yang dipake untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 .

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot model*. Dasar analisisnya (Ghozali,2006) :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam satu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Model regersi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali,2011). Pada penelitian ini, alat analisis yang digunakan untuk uji autokorelasi adalah uji Lagrange Multiplier (LM Test) dan

menggunakan Run Test. Dalam hasil output SPSS, jika koefisien parameter memberikan probabilitas lebih besar dari 0.05 maka model regresi dinyatakan bebas dari masalah autokorelasi.

3.5.3 Analisis Regresi

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan regresi berganda untuk menguji adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model analisis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan *corporate governance (corporate governance disclosure)* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{ICGD} = \beta_0 + \beta_1\text{PDKIn} + \beta_2\text{UD} + \beta_3\text{KDir} + \beta_4\text{Blhd} + \beta_5\text{JPS} + \beta_6\text{KAud} + \beta_7\text{Lev} + \beta_8\text{UkP} + \beta_9\text{Profit} + \beta_{10}\text{TInd} + e$$

Keterangan :

ICGD : Indeks *Corporate Governance Disclosure*

PDKIn : Proporsi Dewan Komisaris Independen

UD : Ukuran Dewan

KDir : Kepemilikan Direktur

Blhd : Kepemilikan *Blockholder*

JPS : Jumlah Pemegang Saham

KAud : Komite Audit

Lev : Tingkat *Leverage*

UkP : Ukuran Perusahaan

Profit : Profitabilitas

TInd : *Dummy* Tipe Industri

3.5.4 Pengujian Hipotesis

3.5.4.1 Uji F (*F Test*)

Uji statistik F dilakukan untuk menguji kemampuan seluruh variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan perilaku variabel dependen (Ghozali,2006). Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi tingkat 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).
2. Jika signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan).

3.5.4.2 Uji Regresi Parsial (*Uji t*)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali,2006). Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha=5\%$). Kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (secara parsial variabel independen tidak punya pengaruh signifikan terhadap variabel dependen).

2. Jika signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis tidak dapat ditolak (secara parsial variabel independen punya pengaruh signifikan terhadap variabel independen).

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi berarti semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *adjusted R square* bukan *R square* karena dapat menimbulkan bias terhadap variabel dependen. *Adjusted R square* dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model (Ghozali, 2006).